

Determinan Praktik *Internet Financial Reporting* (IFR) pada Website Pemerintah Daerah Sumatera Barat

Alkausar Putra Budiman^{1*}, Henri Agustin²

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia.

*Korespondensi: alkausarputra98@gmail.com

Abstract

This study aims to find out the factors that influence internet financial reporting (IFR) on local government websites. In this study, 19 regencies and cities in West Sumatra were used. The data used is from 2015 to 2019. The data analysis method used to prove the correctness of the hypothesis is multiple regression which is processed using SPSS. Based on the results of hypothesis testing, it was found that the type of local government and the characteristics of local government had a negative effect on the amount of internet financial reporting disclosure in 19 regencies and cities in West Sumatra, while the age of the local government had no significant effect on the amount of internet financial reporting disclosure in 19 regencies and cities in West Sumatra.

Keywords: *age of government; characteristics of local government; internet financial reporting; type of local government.*

How to cite

Budiman, A.P., & Agustin, H. (2023). Determinan Praktik Internet Financial Reporting (IFR) pada Website Pemerintah Daerah Sumatera Barat. *Jurnal Nuansa Karya Akuntansi*, 1(1), 49-59. DOI: <https://doi.org/10.24036/jnka.v1i1.4>



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia internet di Indonesia semakin pesat dalam beberapa tahun terakhir, terbukti dengan infrastruktur internet yang semakin maju dan jumlah penggunanya yang terus meningkat. Melihat perkembangan tersebut, pemerintah berupaya meningkatkan transparansi informasi bagi para pemangku kepentingan dengan mengembangkan laporan keuangan melalui internet untuk semua pemerintah daerah. Penggunaan internet diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan transparansi kinerja pemerintahan, sehingga institusi pemerintah memiliki citra positif di mata seluruh masyarakat.

Penggunaan pelaporan keuangan di Internet bersifat wajib dan sukarela bagi seluruh Pemerintah Tingkat I dan II di Indonesia, termasuk Provinsi Sumatera Barat. Secara administratif, Sumatera Barat memiliki 19 kabupaten dan kota yang bertanggung jawab mempublikasikan laporan keuangannya di Internet. Namun, implementasi pelaporan keuangan internet tidak semudah yang diperkirakan sebelumnya, karena tidak semua wilayah Sumbar memiliki sarana, prasarana, dan staf yang lengkap untuk mendorong implementasi pelaporan keuangan melalui internet secara berkelanjutan.

Menurut Sayuti (2019), keberhasilan pemerintah daerah dalam membuat laporan keuangan melalui internet dapat dipengaruhi oleh jenis pemerintah daerah, usia pemerintah dan karakteristik pengelola daerah. Setiap variabel dapat mempengaruhi perubahan kemampuan pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan melalui internet, khususnya di 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat.

Penyelidik, termasuk Laswad dkk. Pengungkapan Informasi Keuangan kepada Otoritas Lokal di Selandia Baru, telah melakukan penelitian tentang determinan pelaporan keuangan di Internet di sektor kota. Styles dan Tennyson (2007) menemukan bahwa luas wilayah, pendapatan per kapita, pendapatan per kapita, dan tingkat utang berpengaruh terhadap ketersediaan laporan keuangan di Internet, sedangkan luas wilayah, pendapatan per kapita, dan tingkat utang berpengaruh positif signifikan di Aksesibilitas Internet Laporan Keuangan di situs web pemerintah AS.

García & García-garcía (2010) menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah, investasi modal, persaingan politik dan visibilitas pers berdampak pada pengungkapan sukarela Internet oleh pemerintah daerah di Spanyol. Di Indonesia, Puspita dan Martani (2012) melakukan penelitian serupa, menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan, ukuran pemerintahan dan kompleksitas pemerintahan berpengaruh positif, sedangkan pendapatan daerah dan belanja daerah berpengaruh positif. Verawaty (2015) menunjukkan bahwa tidak ada korelasi positif antara ukuran pemerintah daerah, pendapatan per kapita, dan tingkat utang. Nosihana dan Yaya (2016) juga berpendapat bahwa leverage, kesempatan yang sama pemerintah daerah, jenis pemerintah daerah, dan penilaian audit tidak berpengaruh positif, sedangkan persaingan publik dan ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif.

Penelitian ini merupakan modifikasi dan pengembangan dari proposal penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini mengacu pada peneliti Destya (2019) yang berjudul Determinan Praktik Pelaporan Keuangan Internet (IFR) pada website Pemerintah Kabupaten/Metropolitan Indonesia, dan menggunakan variabel evaluasi, jenis pemerintahan daerah, usia administrasi, tingkat ketergantungan dan sumber daya manusia. indeks pembangunan. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada jumlah variabel usia administrasi, jenis kotamadya dan karakteristik pengelola daerah.

Penggunaan variabel usia administrasi digunakan karena semakin banyak usia administrasi yang diadopsi maka pemerintah daerah semakin berpengalaman dan terlatih dalam menyajikan laporan keuangan di websitenya (Rosita & Arifin, 2017). Jenis variabel pemerintah daerah digunakan karena karakteristik kabupaten dan kota yang berbeda diharapkan menghasilkan tingkat pengungkapan yang berbeda di situs web pemerintah daerah. Karena akses internet di daerah perkotaan lebih tinggi daripada di daerah kabupaten, pemerintah kota akan mempublikasikan lebih banyak informasi di situs web daripada pemerintah kabupaten (Rahim & Martani, 2016).

REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

Pengaruh Tipe Pemerintah Daerah Terhadap Praktik *Internet financial reporting* dalam *Website* Permerintah Daerah

Hasil penelitian Rahim dan Martani (2018) dan Laswad et al (2005)) tipe pemerintah daerah kota atau kabupaten memiliki pengaruh terhadap praktik *internet financial reporting* di *website* pemerintah daerah. Pada penelitian Ridwan (2019) yang menemukan bahwa tipe kepala daerah berpengaruh negatif terhadap jumlah pengungkapan *internet financial reporting*. Temuan yang sama diperoleh oleh Dwi dan Sari (2018) yang mengungkapkan semakin banyak jumlah kabupaten dan kota dalam sebuah provinsi akan cenderung menurunkan jumlah pengungkapan *internet financial reporting*. Selanjutnya hasil penelitian Setiawan (2017) menemukan bahwa semakin bertambah jumlah kabupaten dan kota

yang melambangkan berbagai tipe pemerintah daerah mendorong menurunnya jumlah pengungkapan internet financial reporting. Semakin banyak jumlah kabupaten dan kota tentu mendorong sulitnya bagi pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur teknologi, karena investasi teknologi membutuhkan biaya yang relatif besar dan waktu yang panjang. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis penelitian ini adalah:

H1: Jenis pemerintah daerah berdampak positif pada praktik pelaporan keuangan Internet di situs web pemerintah daerah.

Pengaruh Umur Administratif Terhadap Praktik *Internet financial reporting* dalam Website Pemerintah Daerah

Hasil investigasi Nosihana dan Yaya (2016), Rahim & Martani (2016), Rosita & Arifin (2017) dan Destya Winda (2018) memiliki pengaruh positif dan signifikan yaitu semakin tua usia administrasi pemerintahan. regional, penyajian yang lebih baik dalam laporan keuangan. Mulyadi (2019) yang juga menemukan bahwa usia pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan di internet. Ridwan (2019) memperoleh penelitian serupa, yang menemukan bahwa usia pemerintah daerah di seluruh kabupaten dan kota di wilayah Jawa Timur tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan di Internet. Hasil ini menunjukkan bahwa ada variabel lain yang juga mempengaruhi jumlah pengungkapan informasi keuangan di Internet, seperti persaingan, investasi di bidang teknologi, dll. Dari uraian di atas, hipotesis penelitian ini adalah:

H2: Usia administrasi memiliki dampak positif pada praktik pelaporan keuangan Internet di situs web pemerintah daerah.

Pengaruh Karakteristik Kepala Daerah Terhadap Praktik *Internet financial reporting* dalam Website Pemerintah Daerah

Mulyadi (2019), yang mencatat bahwa semakin tinggi karakteristik pemimpin daerah yang dirasakan karena tingkat pendidikan formalnya, maka akan menyebabkan penurunan jumlah pengungkapan laporan keuangan melalui internet. Temuan yang sama datang dari Ridwan (2019), yang mencatat bahwa pelatihan yang lebih beragam dari kantor pusat akan menyebabkan pengurangan jumlah pengungkapan pelaporan keuangan di Internet. Selanjutnya, penelitian konsisten diperoleh dari Mulyadi (2019), yang menemukan bahwa karakteristik koki daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pelaporan keuangan online. Berdasarkan uraian di atas, maka terbentuk hipotesis sebagai berikut. Dari uraian di atas, hipotesis penelitian ini adalah:

H3: Atribut kepala daerah berdampak positif pada praktik pelaporan keuangan internet di website pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Survei ini mencakup pemerintah daerah di 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Yang diamati dalam penelitian ini adalah konsistensi pemerintah daerah dalam publikasi laporan keuangan di internet dari tahun 2015 hingga 2019. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dimana data sekunder diperoleh melalui sarana internet dengan menggunakan metode observasi dan dokumentasi. Variabel terikat (Praktik Akuntansi Internet), dapat diakses dari tanggal 17 Oktober sampai dengan 22 November 2019 di website masing-masing pemerintah kabupaten/kota Bengkulu. Pencarian website pemerintah daerah menggunakan Google Search menggunakan aplikasi Mozilla Firefox dan website Kementerian Dalam Negeri RI (www.keuda.kemendagri.go.id).

Data yang digunakan pada variabel bebas, jenis pemerintahan berupa ringkasan laporan pelaksanaan anggaran kabupaten/kota, diperoleh dari (www.djpk.kemenkeu.go.id). Informasi usia pemerintahan pada tahun berdirinya daerah otonom berasal dari website Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (www.kemendagri.go.id). Data yang digunakan pada variabel tanda tangan manajer regional adalah tingkat pendidikan manajer regional, yang terdapat pada profile manajer regional dan dapat diakses melalui Mozilla Firefox.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

***Internet financial reporting* Pemerintah Daerah (IFR)**

Pelaporan keuangan internet di pemerintah daerah diukur dengan menggunakan indeks penilaian (checklist) tingkat pengungkapan keuangan di website pemerintah daerah. Indeks Pengungkapan Keuangan Pemerintah Daerah didasarkan pada studi Styles & Tennyson (2007) tentang akses Internet untuk pelaporan keuangan pemerintah daerah dan telah disesuaikan dengan instruksi Home Office no. 188.52/1797/SJ/2012 untuk meningkatkan transparansi di tingkat daerah. manajemen anggaran.

Dalam survei, jumlah pengungkapan yang digunakan terdiri dari beberapa dimensi antara lain: situs web resmi pemerintah daerah di halaman Google, tautan dengan sorotan LKPD, mesin pencari dengan informasi keuangan LKPD, tiga klik atau kurang di situs web pemerintah daerah, juga mengakses data dalam format PDF untuk diunduh, laporan keuangan lengkap minimal 3 tahun, faks atau contact person yang bertanggung jawab atas laporan, transparansi isi laporan keuangan daerah, total 11 item pengungkapan, menerbitkan laporan realisasi anggaran (LRA), neraca, laporan akun operasi, laporan arus kas, laporan aset, lampiran, dan laporan BPK Variabel dummy digunakan dalam mengukur integritas pelaporan keuangan internet oleh pemerintah daerah, yaitu 1 untuk daerah yang memberikan informasi dan 0 untuk daerah yang tidak melaporkan. Ketika pengungkapan diukur dengan menggunakan rumus berikut:

$$IFRD = \frac{\text{Jumlah Pengungkapan di Masing Masing Daerah}}{\text{Total Seluruh Pengungkapan}} \times 100\%$$

Tipe Pemerintah Daerah

Studi ini menggunakan wilayah Tier II untuk membandingkan jenis pemerintah kota dan kabupaten dalam praktik pelaporan keuangan Internet. Laswad dkk. (2005) menunjukkan bahwa bentuk pemerintahan yang berupa kota dengan populasi yang lebih besar dan lebih beragam membuat website pemerintah daerah semakin canggih dan mengungkapkan informasi yang lebih banyak di website, akses internet yang lebih baik di daerah perkotaan memberikan tingkat informasi yang lebih tinggi. menjangkau daerah perkotaan daripada di lingkungan sekitar.

Maka disinilah pemkot mengoptimalkannya, terutama dalam hal penerbitan laporan keuangan tahunan. Dalam penelitian ini, variabel dummy digunakan untuk mengukur jenis variabel pemerintah daerah yang memberikan skor 1 untuk pemerintah kota dan 0 untuk pemerintah kabupaten (Nosihana & Yaya, 2016). Data jenis masyarakat otonom (pemerintah/kota) telah disarikan dari website Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Umur Administratif

Otoritas lokal yang lebih tua cenderung memiliki keterampilan yang lebih baik karena mereka telah belajar dari pengalaman dari periode sebelumnya. Pejabat pemerintah daerah

yang sudah mapan akan lebih memanfaatkan fasilitas Internet daripada pemerintah daerah yang baru dibentuk. Pengukuran usia pemerintahan daerah dilakukan dengan menghitung tahun berdirinya pemerintahan daerah (berdasarkan undang-undang pembentukan kabupaten/kota otonom) untuk tahun 2016 dan 2017 (Rosita & Arifin, 2017). Data Undang-Undang Pembentukan Masyarakat Otonom berasal dari situs web Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Karakteristik Kepala Daerah

Milne dan Patten (2002) dalam Ismoyo (2010) berpendapat bahwa seseorang dengan pengalaman di bidang akuntansi/bisnis lebih mungkin untuk memahami praktik akuntansi dan informasi akuntansi dalam laporan tahunan. Akibatnya, akuntansi / pengalaman bisnis akan mempengaruhi pemahaman laporan keuangan. Mandasari (2010) dalam Ismoyo (2010) menjelaskan bahwa pemimpin daerah dengan pelatihan bisnis/akuntansi berpengaruh terhadap pemenuhan komitmen LKPD. Indikator untuk variabel ini adalah '1' untuk konteks ekonomi/akuntansi dan '0' untuk konteks non-ekonomi/akuntansi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh tipe kepala daerah, usia pemerintahan daerah, dan karakteristik kepala daerah terhadap laporan keuangan internet di 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Setelah semua data dan informasi terkumpul, maka tahap pengolahan data dapat dilakukan. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan program SPSS. Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan, diperoleh statistik deskriptif seperti terlihat pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Internet Financial Reporting	57	76.00	84.00	81.4035	2.56250
Tipe Kepala Daerah	57	.00	1.00	.6316	.48666
Umur Pemerintah Daerah	57	1.00	3.00	2.5263	.82603
Karakteristik Kepala Daerah	57	.00	1.00	.2632	.44426
Valid N (listwise)	57				

Berdasarkan statistik deskriptif yang diperoleh, dapat dinyatakan bahwa dari total 57 pengamatan, diketahui bahwa jumlah pengungkapan terendah yang dimiliki oleh 19 kabupaten dan kota adalah 76%, sedangkan jumlah informasi keuangan di Internet tertinggi adalah 84%. Median laporan keuangan internet di 19 kabupaten dan kota mencapai 81,40% dengan standar deviasi 2,56%. Berdasarkan rata-rata yang ditentukan, dapat dikatakan bahwa jumlah postingan internet laporan keuangan di 19 kota dan kabupaten di Sumbar relatif tinggi.

Berdasarkan proses tabel data yang dilakukan, diketahui bahwa phantom digunakan untuk mengukur jenis heading daerah. Pengelola wilayah yang menjalankan kelurahan mendapat skor 1, sedangkan manajer wilayah yang menyelenggarakan kota mendapat skor 0. Berdasarkan hasil pengukuran, skor rata-rata untuk pengukuran tipe kepala daerah adalah 0,63 dengan standar deviasi dari data hingga 0,49. Dari nilai rata-rata yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar kepala daerah di Sumatera Barat adalah kabupaten induk, yaitu 12 kabupaten.

Pada proses tabel data juga diketahui bahwa usia administrasi pemerintah daerah terendah di 19 kabupaten dan kota adalah 1, yang diberikan kepada daerah dengan usia administrasi lebih dari 10 tahun, sedangkan nilai respon lebih tinggi adalah 3, yaitu kabupaten dan kota dengan umur administrasi lebih dari 30 tahun. Median umur administrasi

kabupaten dan kota di Sumatera Barat adalah 2,53 dengan standar deviasi 0,83 untuk data tersebut. Berdasarkan hal tersebut, rata-rata usia administrasi kotamadya di 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat adalah lebih dari 30 tahun.

Pada proses tabel data diketahui bahwa sifat-sifat kepala daerah diukur dengan variabel dummy. 1 adalah nilai untuk pemimpin daerah dengan gelar sarjana di bidang ekonomi, sedangkan 0 diberikan kepada pemimpin daerah dengan gelar sarjana di luar ekonomi. Mean yang dilaporkan adalah 0,26, dengan standar deviasi data mencapai 0,44. Dari nilai rata-rata yang ditentukan, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar kepala daerah di 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat mengenyam pendidikan perguruan tinggi di luar jalur ekonomi.

Hasil Pengujian Normalitas

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan, rangkuman hasil disajikan pada Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2
Hasil Pengujian Normalitas

		ARESID
N		57
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0222
	Std. Deviation	.01688
Most Extreme Differences	Absolute	.178
	Positive	.178
	Negative	-.109
Kolmogorov-Smirnov Z		1.340
Asymp. Sig. (2-tailed)		.055

Hasil pengujian menunjukkan bahwa semua variabel penelitian berdistribusi normal, karena koefisien ARESID jauh di atas 0,05, sehingga dapat dilakukan tahap pengujian selanjutnya.

Pengujian Multikolinearitas

Tes klasik kedua dari gejala penerimaan adalah untuk mengidentifikasi kelainan multikolinear. Menurut perkiraan yang dibuat, hasilnya disajikan pada Tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3
Hasil Pengujian Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Tipe Kepala Daerah	.898	1.114
	LN Umur Pemerintah Daerah	.895	1.118
	Karakteristik Kepala Daerah	.991	1.009

a. Dependent Variable: LN Internet Financial Reporting

Hasil pengujian menunjukkan bahwa VIF masing-masing variabel bebas lebih besar dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebas bebas dari anomali multikolinearitas.

Pengujian Autokorelasi

Uji Durbin Watson (DW) dilakukan untuk mendeteksi ada tidaknya aberasi autokorelasi. Menurut perkiraan yang dibuat, hasilnya disajikan pada Tabel 4 di bawah ini:

Tabel 4
Hasil Pengujian Autokorelasi

Model	Durbin-Watson
1	3.002 ^a

Berdasarkan hasil uji autokorelasi diperoleh nilai DW sebesar 3,002. Nilai Durbin-Watson yang diperoleh berada diantara kedua kuadran yaitu - 3 3,002 3, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi positif atau negatif pada model regresi yang akan dianalisis. Oleh karena itu, langkah pengolahan data selanjutnya dapat segera dilakukan.

Pengujian Heteroskedastisitas

Pada penelitian ini dilakukan uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Glejser. Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan, rangkuman hasil disajikan pada Tabel 5 berikut ini:

Tabel .5
Hasil Pengujian Heteroskedastisitas Glejser

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.008	.027		-.316	.753
Tipe Kepala Daerah	-.002	.008	-.041	-.281	.780
LN Umur Pemerintah Daerah	.003	.006	.069	.474	.637
Karakteristik Kepala Daerah	-.001	.008	-.025	-.179	.859

a. Dependent Variable: Unstandardized Residual

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas Glejser diketahui bahwa masing-masing variabel bebas memiliki nilai sig lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebas yang dibentuk dalam model persamaan regresi bebas dari gejala heteroskedastisitas, sehingga sehingga pengolahan data dapat dilakukan secara langsung.

Analisis Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan, rangkumannya ditunjukkan pada tabel 6 berikut ini:

Tabel 6
Hasil Analisis Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.511 ^a	.261	.219	.02804

a. Predictors: (Constant), Karakteristik Kepala Daerah, Umur Pemerintah Daerah, Tipe Kepala Daerah

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan diperoleh koefisien determinasi sebesar 0,261. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa variabel tipe manajer wilayah, usia manajer wilayah dan karakteristik manajer wilayah saja dapat memberikan berbagai kontribusi untuk mempengaruhi tingkat pengungkapan informasi keuangan di Internet 26,10. %, sedangkan sisanya sebesar 73,90% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Hasil Pengujian F-statistik

Tujuan dari uji statistik F adalah untuk secara kolektif menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan, Tabel 4.8 di bawah ini menunjukkan ringkasan hasil:

Tabel 7
Hasil Pengujian F-statistik

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.015	3	.005	6.234	.001 ^a
	Residual	.042	53	.001		
	Total	.056	56			

Berdasarkan hasil uji statistik F diperoleh nilai Sig sebesar 0,001. Dengan demikian, nilai parameter yang diperoleh lebih kecil dari error yang digunakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa jenis kepala daerah, usia pemerintah daerah, dan karakteristik kepala daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap keuangan daerah. Informasi melalui internet di 19 kecamatan. dan kota-kota di Sumatera Barat.

Hasil Pengujian t-statistik

Uji individu dilakukan dengan menggunakan uji-t. Berdasarkan hasil pengolahan, hasilnya ditunjukkan pada Tabel 8 di bawah ini:

Tabel 8
Hasil Pengujian t-statistik

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.429	.015		303.823	.000
	Tipe Kepala Daerah	-.022	.008	-.335	-2.763	.008
	Umur Pemerintah Daerah	-.003	.005	-.083	-.683	.497
	Karakteristik Kepala Daerah	-.031	.009	-.441	-3.680	.001

a. Dependent Variable: LN Internet Financial Reporting

Berdasarkan hasil uji-t untuk variabel regional utama diperoleh nilai sig sebesar 0,008. Hasil ini menunjukkan nilai Sig sebesar $0,000 < 0,05$. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tipe manajer wilayah di 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap informasi keuangan melalui internet.

Pada pengujian statistik t variabel kelompok umur pemerintah daerah diperoleh nilai Sig sebesar 0,497. Maka $P > 0,05$. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa umur pemerintah daerah di 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat tidak berpengaruh signifikan terhadap informasi keuangan di Internet.

Berdasarkan hasil uji-t untuk parameter tingkat pembiayaan daerah diperoleh nilai sig sebesar 0,001. Maka $P < 0,05$. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa karakteristik pengelola wilayah berpengaruh signifikan terhadap informasi keuangan melalui internet di 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat.

Pembahasan

Pengaruh Tipe Kepala Daerah terhadap Jumlah *Internet financial reporting*

Model regresi menunjukkan bahwa variabel regional utama memiliki koefisien regresi negatif. Hasil ini menunjukkan bahwa jumlah otoritas administratif di kabupaten dan kota Sumatera Barat cenderung menurunkan jumlah pengungkapan laporan keuangan di Internet. Temuan ini disebabkan tidak meratanya persebaran fasilitas dan jaringan internet di

Sumatera Barat. Dwi dan Sari (2018) mencapai kesimpulan yang sama, yang menemukan bahwa semakin banyak kabupaten dan kota di suatu provinsi, semakin rendah jumlah pengungkapan tentang laporan keuangan di Internet. Lebih lanjut, penelitian Setiawan (2017) menunjukkan bahwa semakin banyaknya kabupaten dan kota yang melambangkan berbagai jenis pemerintahan daerah menyebabkan penurunan pengungkapan tentang repopulasi keuangan online. Jumlah kabupaten dan kota yang semakin banyak tentunya menyulitkan pemerintah untuk membangun infrastruktur teknologi, karena investasi teknologi melibatkan biaya dan waktu yang relatif tinggi.

Pengaruh Umur Pemerintah Daerah terhadap Jumlah Pengungkapan *Internet financial reporting*

Berdasarkan hasil uji hipotesis kedua, ditemukan bahwa usia administrasi pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan di internet. Hasil yang diperoleh dengan pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa semakin tua usia administrasi pemerintah daerah di 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat maka kenaikan atau penurunan jumlah laporan keuangan di Internet tidak berpengaruh terhadap kenaikan atau penurunan tersebut. Oleh karena itu, hipotesis kedua ditolak.

Hasil yang diperoleh saat pengujian hipotesis kedua sejalan dengan penelitian Mulyadi (2019) yang juga menemukan bahwa usia pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap informasi keuangan online. Ridwan (2019) memperoleh penelitian serupa, yang menemukan bahwa usia pemerintah daerah di seluruh kabupaten dan kota di wilayah Jawa Timur tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan di Internet. Hasil ini menunjukkan bahwa ada variabel lain yang juga mempengaruhi jumlah pengungkapan laporan keuangan di Internet, seperti keterampilan, investasi dalam teknologi, dll.

Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Jumlah Pengungkapan *Internet financial reporting*

Wawasan yang diperoleh menunjukkan bahwa semakin beragamnya sifat pemerintah daerah di 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat akan mengurangi jumlah laporan keuangan yang diungkapkan di Internet. Hasil uji hipotesis tahap ketiga ini sejalan dengan penelitian Mulyadi (2019) yang menemukan bahwa semakin tinggi karakteristik pemimpin daerah menurut jenjang pendidikan formalnya, maka semakin rendah jumlah pengungkapan laporan keuangan pada daerah. Internet. Temuan yang sama datang dari Ridwan (2019), yang mencatat bahwa pelatihan yang lebih beragam dari kantor pusat akan menyebabkan pengurangan jumlah pengungkapan pelaporan keuangan di Internet. Selanjutnya, penelitian konsisten diperoleh dari Mulyadi (2019), yang menemukan bahwa karakteristik koki daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pelaporan keuangan online.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan uraian analisis dan pembahasan hasil uji hipotesis, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting sebagai berikut: Jenis pemerintahan daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah laporan keuangan yang dipublikasikan di internet di 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Usia pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah laporan keuangan yang dipublikasikan di internet di 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Karakteristik pemerintah daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap

tingkat keterbukaan informasi keuangan di internet di 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat.

Saran

Berdasarkan uraian dari pernyataan-pernyataan yang telah diuraikan di atas, dapat diberikan beberapa saran yang mungkin berguna untuk: Pemerintah daerah diharapkan untuk meningkatkan pengungkapan sukarela laporan keuangan Internet karena mereka berusaha untuk menetapkan anggaran untuk meningkatkan infrastruktur jaringan Internet yang dapat mendorong kemajuan dalam pelaporan keuangan Internet di masa depan. Pemerintah daerah diharapkan dapat berbagi informasi tentang penggunaan teknologi berbasis jaringan dengan pihak terkait dan pejabat pemerintah daerah untuk membantu mendorong kemajuan pelaporan keuangan Internet seiring dengan meningkatnya sosialisasi. Sosialisasi pemerintah daerah akan lebih besar untuk menciptakan citra positif di mata masyarakat.

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel baru yang juga akan mempengaruhi jumlah informasi pelaporan keuangan di internet, seperti persepsi kenyamanan, persepsi risiko, dan beberapa variabel lainnya

DAFTAR PUSTAKA

- Alhajjriana, G. I., Nor, W., & Wijaya, R. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Internet financial reporting* Pemerintah Daerah Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 17(2): 100–109.
- Awamleh, R., & Gardner, W. L. (1999). Perceptions of leader charisma and effectiveness: the effects of vision, content, delivery, and organizational performance. *Leadership Quarterly*, 10(3), 345–373.
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.52/1797/SJ Tahun 2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah.
- Ismoyo, Rudi (2010) Pengaruh Karakteristik Kepala Daerah dan Karakteristik Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Kelengkapan Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- Kholifah, Winda, Destya. (2017). Determinan Praktik *Internet financial reporting (IFR)* dalam Website Pemerintah Daerah. F.E Universitas Islam Indonesia.
- Krisnadi, Amalia., & Tarigan, Josua. (2016). Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Keuangan melalui Perilaku Manajer atas Isu Manajemen Lingkungan sebagai Variabel Intervening.
- Laswad, F., Fisher, R., & Oyelere, P. (2005). Determinants Of Voluntary *Internet financial reporting* By Local Government Authorities. *Journal of Accounting and Public Policy*, 24, 101–121.
- Lesmana, Sigit Indra. 2010. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib di Indonesia. Tesis. FE UNS. Surakarta.
- Mubarak, Ahmad & Darmanto, Susetyo. (2015). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Pegawai dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Intervening. Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNTAG Semarang. Maksimum Vol.5 No.1 September 2015 – Februari 2016.
- Nosihana, A., & Yaya, R. (2016). *Internet financial reporting* Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Pada Pemerintah Kota Dan Kabupaten Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 3(2): 89–104.
- Nur Azlina dan Ira Amelia 2014 : Pengaruh *Good Governance* Dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember* – Vol. 12 No. 2.

- Pradipa, Nyoman Angga., Putri, IGAM. Asri Dwija., Ratnadi, Ni Made Dwi. (2016) Gaya Kepemimpinan Transformasional Dalam Hubungan Sistem Pengendalian Intern dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada SKPD Provinsi Bali)
- P, Aditya, Rahman., Sutaryo., & Budiarmanto, Agus. (2013). Determinan Internet Financial Local Government Reporting di Indonesia. SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XVI, Manado, 25-28 September 2013.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/03 Tahun 2009 Tentang Diseminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9 Tahun 2006 Tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Puspita, R., & Martani, D. (2012). Analisis Pengaruh Kinerja Dan Karakteristik Pemda Terhadap Tingkat Pengungkapan Dan Kualitas Informasi Dalam Website Pemda. *Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin*, 1–25, September 2012.
- Rahim, W. M., & Martani, D. (2016). Analisis Pengaruh Tingkat Akses Internet, Kompetisi Politik, Opini Audit, Karakteristik Pemda, Dan Karakteristik Demografi Terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan Dan Non-Keuangan Website Pemerintah Daerah. *Konferensi Regional Akuntansi III, Jember*, April 2016.
- Ratmono, D. (2013). Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Internet: Pengujian Teori Institusional dan Keagenan. *Media Ilmiah Akuntansi*, 1(2): 28-48.
- Rosita, L. R. A., & Arifin, J. (2017). Determinan Kualitas Pengungkapan Laporan Keuangan dalam Website Pemerintah Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi XX Jember*, 1–26, September 2017.
- Sari, Widya, Embun. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Gaya Kepemimpinan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indragiri Hulu. *Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia*.
- Setiawan, Wahyu. (2012). Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia.
- Setyaningrum Febriyani dan Dyah Syafitri. 2012. Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 9(2): 154-170.